

Benahi Administrasi Bank Kalbar

PONTIANAK - Bank Kalbar diminta segera membenahi persoalan administrasi. Hal ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pinjaman pemerintah daerah yang tidak sesuai prosedur, yaitu senilai Rp2,7 miliar.

"Walaupun tidak ada unsur korupsi, tetapi ini jadi warning untuk Bank Kalbar. Mereka harus membenahi administrasi supaya kejadian ini tidak terulang lagi," kata Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya, kemarin.

Menurut Andry, DPRD ikut berkepentingan dalam masalah ini mengingat di dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Pemprov berencana untuk menambah setoran modal kepada Bank Kalbar sebanyak Rp250 miliar dalam tempo lima tahun. "Tentu saja dalam menyalurkan penyertaan modal itu, kinerja Bank Kalbar dan masalah administrasi ini juga menjadi bahan pertimbangan kita," ujarnya.

Di sisi lain, Andry juga meminta agar Bank Kalbar mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kucuran kredit produktif kepada masyarakat. Sebab, menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat membuka seminar kinerja BPD di Hotel Shangrila Jakarta, Senin 12 Desember lalu, kredit produktif yang disalurkan

oleh BPD masih di bawah 40 persen. "Itu artinya BPD masih belum optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi," katanya.

Ia pun mengusulkan supaya Bank Kalbar meningkatkan batas maksimal dalam program kredit usaha mikro. Sebab, batas maksimal selama ini yang dipatok senilai Rp5 juta dianggap belum ideal dan belum bisa mendorong perkembangan usaha kecil secara signifikan. Paling tidak, kata Andry, kucuran kredit tersebut bisa mencapai Rp10 juta-Rp15 juta supaya masyarakat lebih terbantu.

"Lima juta itu sangat minim. Masyarakat mau buka usaha apa? Mungkin hanya bisa jualan sotong pangkong jak. Jadi kita minta kuota atau batasan itu supaya dievaluasi," tambah Andry.

Seperti diberitakan, ketika melaksanakan audit operasional pada 13 BPD seluruh Indonesia, BPK menemukan adanya pembayaran kredit yang tidak sesuai prosedur senilai Rp484 miliar. Penyaluran kredit tersebut di antaranya tanpa memperhatikan tahun anggaran, dokumen persetujuan DPRD dan lain-lain. Kondisi ini terjadi di lima BPD yakni BPD Kalbar sebesar Rp2,7 miliar, BPD Papua Rp102 miliar, BPD Maluku Rp40 miliar, dan BPD Sulselbar Rp329 miliar.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Benahi Administrasi Bank Kalbar

Sambungan dari halaman 16

Direktur Utama Bank Kalbar, Sudirman HMY kemudian

menjelaskan bahwa temuan itu hanya bersifat administratif. Pinjaman pemda menjadi temuan karena tidak adanya

persetujuan DPRD. Dalam hal ini, telah terjadi perbedaan persepsi antara Bank Kalbar dengan BPK. (ron)